BAB I

PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang Masalah**

Hubungan Internasional merupakan suatu sistem hubungan antar negara yang berdaulat dalam pergaulan internasional yang menjadikan kegiatan diplomasi sebagai suatu elemen utama bagi suatu negara sebagai faktor penentu eksistensinya dalam hubungan internasional. Hubungan Internasional terus berkembang mengikuti kemajuan dalam bidang akademik dan kebijakan publik. Hubungan internasional semakin penting perannya terutama setelah adanya perjanjian Westphalia yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa. Hubungan Internasional juga didorong oleh adanya kepentingan ekonomi, teknologi, dan informasi yang tidak dapat lagi dipenuhi oleh negara sendiri. Diplomasi merupakan proses politik untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap Pemerintah negara lain.[[1]](#footnote-1) Diplomasi kekninian juga tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, sosial-budaya, hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang digunakan di situasi apapun dalam hubungan antarbangsa untuk menciptakan perdamaian dalam percaturan politik global serta mencapai kepentingan nasional suatu negara.

Diplomasi sebagai alat untuk tujuan sebuah negara. Diplomasi memiliki kaitan yang erat dengan politik luar negeri, karena diplomasi merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi yang terlatih. Di banyak negara, kebijakan luar negeri dirancang dan diformulasikan oleh Menlu dan staf Deplu. Pelaksanaan diplomasi bilateral dan utilateral serta kegiatan sehari-hari dilaksanakan oleh para diplomat dan perwakilan-perwakilan yang ditempatkan di luar negeri dan di dalam organisasi-organisasi internasional.[[2]](#footnote-2)

Pelaksanaan politik luar negeri RI telah mencerminkan dipomasi yang melibatkan seluruh komponen bangsa guna mencapai kepentingan nasional Negara Indonesia sekaligus terus berperam aktif dalam upaya perwujudan perdamaian dan keamanan dunia, baik di tingkat bilateral, regional, dan global.

Seiring dengan arus Globalisasi yang menghantam dunia menjelaskan bahwa pembahasan dinamika politik internasional masa kini merupakan bagian yang tidak luput dari Globablisasi. Globalisasi telah merubah tatanan sistem internasional termasuk pola interaksi aktor-aktor didalamnya. Proses transformasi ruang dan waktu yang didorong revolusi teknologi dan komunikasi membuat interaksi dan ketergantungan antar berbagai aktor, baik aktor negara maupun non- negara menjadi tidak terelakkan bahkan seakan mutlak ada. Hal ini dikarenakan globalisasi telah memberikan kesempatan kepada sebagian besar individu untuk dapat berinteraksi dengan individu lain tanpa adanya batasan ruang dan waktu (transformation of space and time) (Giddens 1999).[[3]](#footnote-3)

Globalisasi dan Revolusi teknologi yang terjadi dewasa ini telah membawa konsekuensi langsung pada praktik diplomasi. Revolusi teknologi yang menandai lahirnya abad ke 21 secara mendasar telah merubah tatanan dunia. Dalam bidang diplomasi, teknologi telah membuat peran diplomat menjadi kurang signifikan dibandingkan masa sebelumnya. Teknologi transportasi dan informasi menyebabkan waktu dan tempat kehilangan relevansinya sehingga diplomasi tradisional sudah harus ditinggalkan.[[4]](#footnote-4)

Dewasa ini, aktivitas diplomasi menunjukkan peningkatan peran yang sangat signifikan seiring dengan semakin kompleksnya isu-isu dalam hubungan internasional. Hubungan internasional pun tidak lagi semata-mata dipandang sebagai hubungan antar negara namun juga meliputi hubungan antar masyarakat internasional. Dengan demikian, diplomasi tradisional atau yang dikenal dengan istilah ‘*first track diplomacy’* yang hanya melibatkan peran pemerintah dalam menjalankan misi diplomasi, dinilai tidak akan efektif dalam rangka menyampaikan pesan-pesan diplomasi terhadap suatu negara. Oleh karena itu, aktivitas diplomasi publik yang melibatkan peran serta publik akan sangat dibutuhkan dalam rangka melengkapi aktivitas diplomasi tradisional.

Alasan utama dari keterlibatan publik ini didasarkan pada asumsi yang cukup sederhana yaitu pemerintah tidak selalu dapat menjawab berbagai tantangan dalam isu-isu diplomasi yang kini semakin kompleks terlebih sifat khas yang melekat dari pemerintah adalah sangat kaku (*rigid*). Melalui peningkatan aktivitas diplomasi publik, pemerintah berharap bahwa upaya diplomasi akan berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas dan besar pada masyarakat internasional. Di samping itu, pemerintah pun berharap bahwa keterlibatan publik ini dapat membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan wakil-wakil pemerintah sekaligus dapat memberikan masukkan dan cara yang pandang yang berbeda dalam memandang suatu masalah. Definisi dari diplomasi publik sangat beragam. Diplomasi publik didefinisikan sebagai upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui *understanding, informing, and influencing foreign audiences*. Dengan kata lain, jika proses diplomasi tradisional dikembangkan melalui mekanisme *government to government relations*, maka praktik diplomasi publik lebih ditekankan pada *government to people* atau bahkan *people to people relations*. Tujuannya adalah agar masyarakat internasional mempunyai persepsi baik tentang suatu negara, sebagai landasan sosial bagi hubungan dan pencapaian kepentingan yang lebih luas. Dalam melaksanakan peran diplomasi publik, Pemerintah dapat melakukan serangkaian program kegiatan seperti seminar dan kuliah umum kepada civitas akademik di perguruan tinggi, misi pertukaran kebudayaan, program beasiswa, menyelenggarakan dialog dan diskusi, dan lain-lain.

Diplomasi publik telah berkembang pesat terutama dalam dua dekade terakhir. Perkembangannya dipicu oleh kenyataan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi jalur pertama *(first track diplomacy)* dianggap telah gagal mengatasi konflik-konflik antar negara. Kegagalan diplomasi jalur pertama telah mengembangkan pemikiran untuk meningkatkan diplomasi publik sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan konflik-konflik antar negara.[[5]](#footnote-5)

Diplomasi Publik Indonesia di ASEAN sangat berperan penting dalam mewujudkan salah satu cita-cita kawasan regional Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Salah satu cita-cita ASEAN adalah mewujudkan *ASEAN Economic Community (AEC)* atau yang juga disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal ini dikarenakan untuk mencapai tingkat dinamika pembangunan ekonomi yang lebih tinggi, kemakmuran yang berkelanjutan, pertumbuhan yang merata dan pembangunan yang terintegrasi di ASEAN. Negara-negara ASEAN menyadari bahwa semakin meningkatnya ketergantungan negara-negara anggota ASEAN di kawasan dan dengan kawasan lain di dunia, serta menekankan pentingnya untuk memperkecil kesenjangan pembangunan dalam rangka mempercepat pembentukan *ASEAN Community 2015.*

Terbentuknya cita-cita *ASEAN Economic Community* Ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan *ASEAN Economic Community (AEC)* ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.

Pentingnya peran Diplomasi Publik Indonesia di ASEAN disini adalah sebagai alat untuk menginformasikan kepada masyarakat Indonesia bahwa Indonesia harus siap meghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan diresmikan pada akhir tahun 2015 ini.

Indonesia tengah bersiap menghadapi *ASEAN Economic Community (AEC)* 2015. Dampak terciptanya AEC adalah pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Tujuan utama dibentuknya *ASEAN Economic Community (AEC)* untuk meningkatkan stabilitas  perekonomian dikawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antar negara ASEAN.[[6]](#footnote-6)

Dalam perkembangannya sejak didirikan tahun 1967, ASEAN menyepakati untuk mengembangkan sebuah kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020 (Wahid 2008). Harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur pada tahun 1997. Untuk merealisasikan harapan tersebut, ASEAN kemudian mengesahkan Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan ASEAN Community (Komunitas ASEAN) dimana target tersebut kemudian dipercepat menjadi tahun 2015. Ada 3 pilar yang disepakati sebagai bagian dari pembentukan *ASEAN Community* 2015, yaitu *ASEAN Economic Community* (AEC), *ASEAN Political Security Community* (APSC) dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC) (Jones & Smith 2007).[[7]](#footnote-7)

Sebagai salah satu negara kunci di kawasan Asia Tenggara sekaligus sebagai Ketua ASEAN di tahun 2011, Indonesia dituntut tampil optimal dalam proses regional tersebut. Tetapi peran ini hanya dapat dilakukan bila Indonesia memperlihatkan kemajuan berarti dalam proses demokrasi dan menjaga stabilitas dalam negeri. Jika dilihat dari sisi potensi ekonomi, Indonesia merupakan salah satu *emerging country* yang saat ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi ASEAN, dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,3% jika dibandingkan dengan Malaysia 5,4%, Thailand 5%, Singapura 1,2%, Filipina 6,6%, dan Vietnam 5,7%.[[8]](#footnote-8)

Dari sisi jumlah penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar yakni 247 juta jiwa sebagai pasar potensial dan tenaga kerja. Prospek Indonesia sebagai negara dengan perekonomian nomor 16 di dunia, nomor 4 di Asia setelah China, Jepang dan India, serta terbesar di Asia Tenggara, semakin menjanjikan karena didukung oleh melimpahnya sumber daya alam, pertumbuhan konsumsi swasta dan iklim investasi yang makin kondusif. Itu, sebabnya Indonesia diprediksi bersama negara-negara Brazil, Rusia, India dan China (BRIC) akan mendominasi Pendapatan Domestik Brutto (PDB) dunia dengan share lebih dari 50% pada tahun 2025 dimana PDB perkapita Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar US$ 15.000.[[9]](#footnote-9)

Untuk mempertegas keinginan pembentukan *ASEAN Community*, dalam  KTT ke-10 ASEAN di Vientiane tanggal 29–30 November 2004, disetujui  tiga Rencana Aksi (*Plan of Action*/ PoA) pada masing-masing pilar yang merupakan program jangka panjang dalam merealisasikan pembentukan *ASEAN Community*. KTT tersebut juga mengintegrasikan ketiga Rencana Aksi Masyarakat ASEAN ke dalam *Vientianne Action Programme* (VAP) sebagai landasan program jangka pendek sampai menengah periode 2004–2010.  Optimisme dan antusiasme negara anggota ASEAN dalam membentuk *ASEAN Community atau* Masyarakat ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya Deklarasi Cebu mengenai Percepatan Pembentukan Masyarakat ASEAN pada tahun 2015 *(Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015)* oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007. Dengan demikian, pembentukan Masyarakat ASEAN dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015.[[10]](#footnote-10)

Langkah tegas ASEAN berikutnya dalam memperkokoh kerja sama ASEAN adalah penyusunan suatu piagam *(charter*) sebagai dokumen kerangka hukum dan kelembagaan ASEAN *(legal and institutional framework for ASEAN).* Usulan penyusunan Piagam ASEAN (ASEAN *Charter*) disampaikan pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur tahun 2005. Penyusunan Piagam ASEAN dimulai sejak tahun 2006 melalui pembentukan Kelompok Ahli *(Eminent Persons Group/ EPG)* dan dilanjutkan oleh Gugus Tugas Tingkat Tinggi *(High Level Task Force)* dalam melakukan negosiasi terhadap isi draft Piagam ASEAN.  Selanjutnya, melalui Bali Concord III yang disahkan dalam KTT ke-19 ASEAN di Bali, 17-19 November 2011,ASEAN memantapkan diri untuk mewujudkan kepentingan kawasan dan global yang lebih damai, adil, demokratis dan sejahtera. Bali Concord III mengukuhkan posisi ASEAN dalam masyarakat global sebagai entitas yang bersifat outward looking dan aktif memberikan solusi terhadap permasalahan global.   Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Masyarakat ASEAN, seluruh negara anggota ASEAN menyepakati *Bandar Seri Begawan Declaration On The ASEAN Community’s Post 2015 Vision* dalam KTT ASEAN ke-23 di Bandar Seri Begawan, 9-10 Oktober 2013. Dalam deklarasi tersebut, seluruh negara anggota ASEAN berkomitmen untuk merumuskan lagi visi Masyarakat ASEAN setelah Pasca 2015.

*ASEAN Economic Community* yang seharusnya diwujudkan pada tahun 2020 seperti yang dijelaskan diatas tetapi melalui kesepakatan bersama anggota ASEAN maka *ASEAN Community* dipercepat menjadi tahun 2015. Kesepakatan bersama untuk mengintegrasikan berbagai negara ASEAN *(Indonesia,* *Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunai Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos dan* *Myanmar)* yang masing-masing memiliki latar-belakang sosial-budaya, ideologi politik, ekonomi dan kepentingan berbeda ke dalam suatu komunitas yang disebut *ASEAN Community* ini masih menghadapi sejumlah kendala besar, khususnya bagi Indonesia yang masih dihadapkan dengan berbagai masalah multi dimensi yang sarat kepentingan.

*ASEAN Economic Community* dengan sasarannya yang mengintegrasikan ekonomi regional Asia Tenggara menggambarkan karakteristik utama dalam bentuk pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, kawasan pengembangan ekonomi yang merata atau seimbang, dan kawasan yang terintegrasi sepenuhnya menjadi ekonomi global. Sebagai pasar tunggal kawasan terpadu ASEAN dengan luas sekitar 4,47 juta km persegi yang didiami oleh lebih dari 600 juta jiwa dari 10 negara anggota ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memacu daya saing ekonomi kawasan ASEAN yang diindikasikan melalui terjadinya arus bebas *(free flow)* : barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal.

Pentingnya *ASEAN Economic Community* tidak terlepas dari dampak positif dan manfaat dari diberlakukannya perdagangan bebas diwilayah regional Asia Tenggara tersebut. Mungkin saat ini dampak positifnya belum begitu terasa karena MEA baru saja diberlakukan yaitu pada tahun 2015, namun diharapkan manfaat besarnya akan terasa pada tahun-tahun selanjutnya.

Dari pembahasan diatas maka dapat dilihat kebijakan Luar Negeri Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN dan kaitan diplomasi publik Indonesia di ASEAN sebagai alat untuk mengukur kesiapan Negara Indonesia dalam memasuki *ASEAN Community 2015* baik dalam hal sumber daya manusia dan kesiapan manufaktur Negara Indonesia itu sendiri.. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk mengindentifikasikan sumber permasalahan dan menemukan solusi terkait kesiapan Negara Indonesia dalam memasuku *ASEAN Economic Community (AEC) 2015*. Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis mengajukan judul penelitian dalam karya tulis ini sebagai berikut:

 **“DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA DAN KAITANNYA DALAM KESIAPAN INDONESIA MEMASUKI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY* 2015”**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, serta terkait dengan judul penelitian yang diambil peneliti, untuk memudahkan dalam menganalisis masalah, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa saja kaitan Diplomasi Publik dengan kesiapan Indonesia memasuki *ASEAN Economic Community ?*
2. Sejauh mana persiapan Indonesia dalam Memasuki *ASEAN Economic Community* 2015 *?*
3. Apa saja Upaya yang dilakukan Indonesia dalam mempersiapkan Negara dan Masyarakatnya dalam memasuki *ASEAN Economic Community* 2015?
4. **Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan yang ada, maka penyusun membatasi masalah penelitian dengan menitik beratkan pada **“Upaya Persiapan Indonesia dalam Memasuki *ASEAN Economic Community 2015*”**

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka dapat disusun sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

**“Bagaimana kaitan Diplomasi Publik Indonesia khususnya dalam kesiapan Indonesia dalam memasuki *ASEAN Economic Community 2015*?”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas masalah yang dituangkan dalam pertanyaan penelitian tentang kaitan Diplomasi Pubik Indonesia di ASEAN dalam kesiapan Indonesia memasuki *ASEAN Economic Community (AEC) 2015*, antara lain:

1. Menjelaskan kaitan dan Diplomasi Publik Indonesia dengan kesiapan Indonesia memasuki *AEC* 2015 dalam konsep Hubungan Internasional.
2. Menjelaskan dan menganalisa upaya pemerintah dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi *ASEAN Economic Community (AEC) 2015.*
3. Menjelaskan dan menganalisa kebijakan – kebijakan Pemerintah Indonesia dalam bidang Diplomasi publik dalam negeri yang berpengaruh terhadap kesiapan negara menghadapi *ASEAN Economic Community 2015.*

**2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penilitian ini, diharapkan berguna bagi setiap pembaca yang tertarik terhadap masalah kesiapan Indonesia dalam menhadapi pasar bebas atau *ASEAN Economic Community*. Selain itu, penelitian juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai masukan dalam khasanah keilmuan HI yang menjelaskan, menggambarkan, dan menganalisa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan Negara Indonesia memasuki *ASEAN Economic Community.*
2. Dapat dijadikan pembanding atau tolak ukur bagi penelitian lainnya yang mengangkat tema yang sama, yaitu seputar permasalahan dan fenomena *ASEAN Economic Community.*
3. Sebagai prasyarat bagi peneliti untuk menyelesaikan Studi Strata S-I dan mendapat gelar Sarjana Ilmu Politik (S.Ip) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan Bandung.
4. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
5. **Kerangka Teoritis**

Sebagai pedoman untuk mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian, maka penulis menggunakan suatu kerangka teori-teori para pakar yang sesuai untuk permasalahan diatas. Adapun teori-teori yang berkaitan dengan hubungan internasional sampai dengan permasalahan peran, efektivitas serta teori kawasan yang dimunculkan sesuai dengan objek penelitian yang diambil yaitu mengenai;

**“Diplomasi Publik Indonesia dan Kaitannya dalam Kesiapan Indonesia Memasuki *ASEAN Economic Community* 2015”**

Hubungan Internasional didasarkan kedalam beberapa faktor yang menunjang terjadinya proses hubungan antara negara-negara. Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya, seperti perpindahan penduduk, pariwisata, olahraga, atau pertukaran budaya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Ilmu Hubungan Internasional merupakan bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relations*).[[11]](#footnote-11)

Hubungan Internasional menurut Mas’Oed dalam bukunya Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodelogi (LP3ES.Jakarta) suatu kerangka analitis menyatakan istilah hubungan internasional sebagai berikut:

**“Awal memahami aktivitas dan fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional yang memiliki tujuan dasar mempelajari, yaitu perilau-perilaku aktor-aktor Internasional baik actor negara maupun aktor non negara. Dalam interaksi internasional yang meliputi perilaku perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi serta koalisi maupun interaksi yang terjadi dalam suatu organisasi internasional.”** [[12]](#footnote-12)

**“Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional. Yaitu meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi pemerintah dan pemerintah domestic serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bias terwujud kerjasama, pembentuan aliansi, perang, konflik, serta interarksi dalam organisasi internasional.”**[[13]](#footnote-13)

Meningkatnya hubungan antar negara pada masa ini, sangat tepat rasanya menggunakan Teori Kerjasama Internasional dalam penelitian ini, karena Semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan terlebih dalam meningkatkan perkembangan dan kemajuan negaranya. Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Perkembangan situasi hubungan internasional ditandai dengan berbagai kerjasama internasional dan berkembangnya berbagai aspek diantaranya rasionalisme ekonomi di berbagai kawasan telah membawa pengaruh semakin besarnya persoalan sosial ekonomi yang lebih menyita perhatian negara- negara di dunia melalui serangkaian kerjasama internasional.

 Hubungan dan kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun juga tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan kebutuhannya yang ada di negara lainnya. kerjasama internasional akan menjadi sangat penting sehingga patut dipelihara dan diadakan suatu pengaturan agar berjalan dengan tertib dan manfaatnya dapat dimaksimalkan sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar negara satu dengan lainnya.

Menurut **Kalevi J. Holsti**, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka. [[14]](#footnote-14)

Pelaksanaan kerjasama internasional permasalahannya bukan hanya terletak pada identifikasi sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu. Kerjasama pun akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Sesuai dengan tujuannya, Kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut.

 pengertian politik luar negeri dalam studi Hubungan Internasional, politik luar negeri merupakan studi yang kompleks, karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal, tapi juga melibatkan aspek – aspek internal suatu negara. Sebagai suatu sistem, Menurut **James N. Rosenau** yaitu:

**“Rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai suatu input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimiliknya.”**[[15]](#footnote-15)

Adanya persamaan maupun perbedaan soal kepentingan nasional diantara negara-negara atau aktor hubungan internasional yang berinteraksi. Hal ini menyebabkan terbentuknya pola hubungan satu sama lain, yaitu: kerjasama *(cooperation),* persaingan *(competetion),* dan konflik *(conflict)*. Hubungan Internasional menjadi dasar bagi negara-negara atau bangsa-bangsa dalam meningkatkan kohefisitas dengan negara ataupun aktor hubungan lainnya terutama karena alasan kesamaan kepentingan.

**Kepentingan Nasional** (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan.  Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan serta kesejahteraan.  Kedua hal pokok ini yaitu keamanan dan kesejahteraan. Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan.  Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai ”Kepentingan Nasional”.[[16]](#footnote-16)

Menurut **Graham Evans** dan **Jeffney Newham,** definisi dari kepentingan nasional adalah:

**“Kepentingan nasional dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.”**[[17]](#footnote-17)

**Organisasi Internasional** termasuk bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari jaringan hubungan internasional dan bahwa kebanyakan negara berpartisipasi dalam berbagai jenis organisasi tidak hanya memperluas kemungkinan untuk kebijakan nasional tetapi menambah ikatan ditempat negara beroperasi.[[18]](#footnote-18)

**Teuku May Rudy** dalam *Administrasi dan Organisasi Internasional* mencoba mendefinisikan organisasi internasional sebagai berikut.

**“Pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapapkan atau diproyeksikan untuk bergabung serta menjalankan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang dieprlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah maupun antara sesame kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.”[[19]](#footnote-19)**

Pada dasarnya konsep organisasi internasional itu sendiri dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu[[20]](#footnote-20):

1. *Inter-Governmental Organization/*IGO (Organisasi Antar Pemerintah); anggotanya merupakan delegasi resmi pemerintah dari negara-negara dunia.
2. *Non-Governmental Organization/*NGO (Organisasi Non Pemerintah); merupakan kelompok-kelompok swasta di bidang ekonomi, kebudayaan, lingkungan hidup dan sebagainya.

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah diatas, bahwa diplomasi adalah alat atau sarana untuk mewujudkan politik luar negeri suatu negara.

**Komunikasi Internasional** menurut **Davison** dan **George** adalah sebagai hubungan politik antar bangsa menyebutkan sebagai:

**“By International Political Communication, we refer to the use by national states of Communication to influence the politically relevent behaviour in other national states”.**

Dengan ini maka dapat dimasukkan ke dalam pengertian ini segala macam bentuk kegiatan seperti propaganda, informasi, diplomasi dan pertahanan keamanan suatu negara. Tapi dari pengertian ini, tidak termasuk penyebaran agama dan pendidikan.[[21]](#footnote-21)

Dalam kaitannya dengan hubungan internasional, komunikasi menjadi sebuah alat untuk melakukan interaksi antar negara. Hubungan internasional sendiri berarti “*International Relations is the relationships between individuals and individuals, between individuals and groups, between groups and groups, between gropus and states, and between states and states”.[[22]](#footnote-22)*

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa hubungan yang terjadi tidak dapat terlaksanan tanpa adanya komunikasi. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa komunikasi berperan dalam menata hubungan internasional.

 Menurut Barston bahwa diplomasi dapat didefisinisikan

 “**Diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalu korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait”[[23]](#footnote-23)**

 Diplomasi Publik merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan diplomasi jalur pertama yang diajukan oleh wakil-wakil pemerintah. Meningkatnya peran aktor-aktor bukan negara pada era 1990an, seperti media massa dan NGO Internasional, menyebabkan negara bukan lagi aktor utama untuk mencapai tujuan nasional.[[24]](#footnote-24)

 Konsep diplomasi publik adalah proses komunikasi pemerintah terhadap publik internasional yang bertujuan untuk memberikan pemahaman ataupun informasi mengenai sebuah negara, budaya, kepentingan nasional ataupun kebijakan- kebijakan negara tersebut. Dalam diplomasi publik tidak hanya tertuju pada publik internasional tetapi juga dapat dituju kepada publik domestik karena didalam proses diplomasinya tidak hanya di luar negeri tetapi juga di dalam negeri. Maka, dapat dikatakan bahwa diplomasi publik berfungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui pemahaman, informasi serta mempengaruhi publik di luar negeri karena diplomasi publik merupakan salah satu instrument dari *soft power.*

Menurut **Sukawarsini Djelantik** dalam bukunya Diplomasi antara Teori dan Praktik**,** definisi dari Diplomasi Publik adalah:

**“Diplomasi Publik bertujuan menumbuhkan opini masyarakat yang positif di negara lain melalui interaksi dengan kelompok-kelompok kepentingan. Oleh karena itu, diplomasi publik mensyaratkan kemampuan komunikasi antar budaya karena terkait dengan perubahan sikap masyarakat, saling pengertian dalam melihat persoalan-persoalan politik luar negeri. Di era informasi, pendapat masyarakat dapat secara efektif mempengaruhi tindakan pemerintah.”**[[25]](#footnote-25)

 Merujuk kepada masalah penelitian diatas, penulis memasukkan teori Sosialisasi untuk mendukung penelitian ini.

 Teori Sosialisasi menurut **Charlotte Buhler**  adalah :

**“Sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya, agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.”[[26]](#footnote-26)**

Teori Regionalisme ini nantinya akan sangat membantu dalam menganalisa keberlangsungan suatu kawasan. Yakni menjelaskan secara historis, mengapa suatu kawasan masih eksis dan kemungkinan upaya yang dapat dilakukan untuk melanggengkan kawasan tersebut.

Menurut **Craig A Snyder** bahwa Regionalisme adalah:

**“Region atau kawasan diartikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis karena berada dalam satu wilayah tertentu”**[[27]](#footnote-27).

Menurut **Bruce Russet** (dalam Hurrel, 1995:38), Regionalisme adalah:

**“adanya ikatan sosial *(social cohesiveness,* berupa ikatan etnis, ras, bahasa, agama, budaya, sejarah, dan kesadaran akan warisan bersama), ikatan ekonomi *(economic cohesiveness,* yaitu pola-pola perdagangan, kesalingtergantungan ekonomi, dan lainnya), ikatan politik (*politic cohesiveness,* berupa tipe rezim, ideology dan lainnya), dan ikatan organisasional (*organizational cohesiceness* dengan melihat keberadaan atau eksistensi dari suatu institusi regional secara formal).[[28]](#footnote-28)**

Dengan demikian, syarat terbentuknya satu kawasan dapat terpenuhi secara geografis dan struktural. Dengan logika ini, maka seharusnya semua kawasan di dunia dapat menjadi sekumpulan negara yang mendeklarasikan diri mereka sebagai satu kawasan yang sama. Namun pada kenyataannya, tidak semua kawasan memiliki intensitas interaksi dan kemajuan yang sama antara satu kawasan dengan yang lainnya.

Lahirnya kawasan regional tentunya melahirkan cita-cita dari kawasan itu sendiri, salah satu cita-cita kawasan regional ASEAN adalah mewujudkan suatu Ekonomi yang terintegritas, yatu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

**“Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu MEA memiliki empat karateristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global”.[[29]](#footnote-29)**

Melihat dari teori – teori ilmu sosial dan politik yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, pembentukan negara, hubungan antar negara , dan konsep ASEAN. Dapat disimpulkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya, manusia, kelompok, bahkan negara akan melakukan bentuk komunikasi dengan pihak lainnya, dan akan menggunakan pengaruh untuk mencapai hal tersebut.

1. **Kerangka Hipotesis**

Berdasarkan kerangka teoritis dan perumusan masalah diatas, maka ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut :

 **“DIPLOMASI PUBLIK SEBAGAI UPAYA INDONESIA DALAM PERSIAPAN MEMASUKI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY* 2015 TELAH DILAKSANAKAN SECARA OPTIMAL SEHINGGA INDONESIA NAMPAK SIAP MELAKSANAKAN AGENDA *ASEAN ECOMOMIC COMMUNITY* (AEC)”**

1. **Operasional Variabel dan Indikator**

Untuk membantu menganalisa dan menjelaskan hipotesis diatas, maka penulis membuat definisi operasional dan indikator sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam (teoritis) | Indikator (Empiris) | Verifikasi (Analisis) |
| Variabel Bebas:Diplomasi publik sebagai upaya indonesia dalam persiapan memasuki *Asean Economic Community* 2015 telah dilaksanakan secara optimal | 1. adanya program sosialisasi mengenai pemahamam *ASEAN Economic Community* kepada publik, pemangku kepentingan, serta pelaku usaha dan masyarakat ASEAN.
 | 1. Data dan fakta mengenai program sosialisasi mengenai pemahamam *ASEAN Economic Community* kepada publik, pemangku kepentingan, serta pelaku usaha dan masyarakat ASEAN. |
| Variabel Terikat:Sehingga indonesia nampak siap melaksanakan agenda *Asean Economic Community* (AEC) | 1. adanya Persiapan masyarakat dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan sektor Industri
2. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 | 1. Data dan fakta mengenai peningkatan daya saing ekonomi dan sector indusri
2. Data dan fakta mengenai peningkatan sumber daya Manusia (SDM)
 |

Table 1 Variabel dan Indikator

**4. Skema Kerangka Teoritis**

**Gambar 1.1**

PEMERINTAH INDONESIA

DIPLOMASI PUBLIK

ASEAN

SOSIALISASI

PUBLIK INDONESIA

1. PENINGKATAN EKONOMI DAN SEKTOR INDUSTRI
2. PENINGKATAN KUALITAS SDM

INDONESIA SIAP MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

Tingkat analisis dalam penelitian ini menggunakan Tingkat analisis korelasionis yaitu penelitian yang unit eksplanasinya dan unit analisanya pada tingkatan yang sama. Pada penelitian ini Efektivitas Kinerja Diplomasi Publik Indonesia sebagai variable dependen dan *ASEAN Economic Community* (AEC) 2015 bertindak sebagai variable independen berada pada tingkatan yang sama.

1. **Metode Penelitian**

Metode adalah cara atau langkah-langkah yang diterapkan guna melakukan kajian terhadap masalah yang bertujuan mencari jawaban dan cara pemecahan berdasarkan data yang dihimpun.

 Untuk keperluan penelitian dan penganalisaan maka penulis menggunakan metode penelitian, yaitu:

**Metode Deskriptif**

Metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis dan mengklarifikasi gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan dari beberapa kejadian dan masalah yang aktual ditengah-tengah realita yang ada.

 Dengan metode ini, data yang dikumpulkan, diklarifikasikan, diolah dan kemudian dianalisa berdasarkan teori-teori yang berlaku untuk memberi gambaran mengenai Efektivitas Diplomasi Publik dalam mempersiapkan Masyarakat Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan *(Library Research)*, yaitu berusaha untuk mencari data melalui pengamatan tidak langsung dengan membaca buku, laporan, surat kabar, website, dan artikel, untuk memperoleh pengertian dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang akan dipergunakan dalam pembuatan proposal ini sesuai dengan judul dan pembahasannya, lokasi yang akan dituju adalah:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan (UNPAS)

Jl. Lengkong Besar No.68

1. Perpustakaan Umum Universitas Parahyangan (UNPAR)

Jl. Ciumbeluit

1. Perpustakaan Kementrian Luar Negeri RI

Jl. Taman Pejambon No.6

1. **Lama Penelitian**

Penelitian dan penulisan ini dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan, yaitu dimulai pada bulan Oktober 2015 sampai dengan April 2016.

1. **Sistematika Penulisan**

**BAB 1 PENDAHULUAN**

Berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Hipotesis, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, Lokasi dan Lama Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II DESKRIPSI TENTANG DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA**

Dalam Bab ini penulis mencoba menguraikan variabel bebas dalam masalah penelitan, yaitu menguraikan tentang Diplomasi Publik yang diterapkan di Indonesia.

**BAB III DESKRIPSI TENTANG INDONESIA DALAM *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY* 2015**

Dalam Bab ini penulis mencoba menganalisa konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN dan implikasiya terhadap anggota-anggota Negara ASEAN.

**BAB IV KESIAPAN INDONESIA DAN MASYARAKATNYA MEMASUKI AEC DAN KORELASINYA DENGAN DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA**

Merupakan analisis terhadap kedua variabel penelitian yaitu Efektivitas kinerja Diplomasi Publik Indonesia dan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini akan memaparkan beberapa kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk rangkuman singkat tapi jelas dan informative.

1. Sumaryo Suryokusmo. 2004. *Praktik Diplomasi.* Jakarta: STIH IBLAM. Hal.1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Suwakarsini Djelantik. *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*. 2008. Yogyakarta. Hlm. 13. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rizki Damayanti, “Efektivitas Peran dan Kinerja Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dalam Mensosialisasikan ASEAN Community 2015” dalam Global & Strategis, Th. 8, No. 1 (2014) hlm. 110 [↑](#footnote-ref-3)
4. Suwakarsini Djelantik. *Op.Cit.,* hlm. 189. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
6. “pahami masyarakat ekonomi ASEAN MEA” dalam <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/12/pahami-masyarakat-ekonomi-asean-mea-2015> , diakses 27 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-6)
7. Rizki Damayanti., *Op.Cit*., Hal. 110 [↑](#footnote-ref-7)
8. Yusuf Wanandi, *“ASEAN dan Kebijakan RI“,*Harian Kompas, Indonesia 25 Juli 2008, Kompas, hlm. 4-5. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid.,* Hal. 5. [↑](#footnote-ref-9)
10. “Sejarah dan latar belakang pembentukan ASEAN”, dalam http://www.kemlu.go.id/Pages/Asean.aspx?IDP=16&l=id , di akses 2 November 2015. [↑](#footnote-ref-10)
11. George Shcwarzenberger, *Power Politics*. [↑](#footnote-ref-11)
12. Mochtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodelogi*, (Jakarta:LP3S, 1987). Hlm. 28 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-13)
14. K.J Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988., hlm. 652-653. [↑](#footnote-ref-14)
15. James N. Rosenau*, The Scientific Study of Foreign Policy*. [↑](#footnote-ref-15)
16. T.May Rudy, *Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hal 116 [↑](#footnote-ref-16)
17. Graham Evans dan Jeffney Newham, *The Dictionary of World Politics: A Reference Guide to*

*Concept, Ideas, and Institutions* (Hasvester: Wheatsheaf, 1990). Hlm. 294. [↑](#footnote-ref-17)
18. Herman, Charles F., Kegley Jr., Charles W. Rosenau, James N, *New Directions in the Study of Foreign Policy*, Boston, Allen and Unwin, 1987, hal. 460 [↑](#footnote-ref-18)
19. Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional* (Bandung: Rafika Aditama, 1998), hlm. 3 [↑](#footnote-ref-19)
20. Le Roy. A. Bennet. *International Organizations: Principles and Issues*. New Jersey: Prentice Hall Inc, 1997, hal 2-4. [↑](#footnote-ref-20)
21. “Komunikasi Internasional” , dalam <http://hirkamirhadi1.blogspot.co.id> diakses 9 Januari 2016 [↑](#footnote-ref-21)
22. Bary Buzan, *International Relations.* [↑](#footnote-ref-22)
23. Suwakarsini Djelantik. *Op.Cit.,* hlm. 4. [↑](#footnote-ref-23)
24. Suwakarsini Djelantik. *Op.Cit.,* hlm. 187. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.,*hlm. 191. [↑](#footnote-ref-25)
26. “Pengertian Sosialisasi menurut para ahli” , dalam <http://genggaminternet.com/pengertian-sosialisasi-menurut-para-ahli/> diakses 5 November 2015 [↑](#footnote-ref-26)
27. Snyder, Craig A. *Contemporary Security and Strategy*.Palgrave : Macmillan. 2008. hal., 228. [↑](#footnote-ref-27)
28. Nuraeni S, Deasy Silvya dan Arfin Sudirman, *Regionalisme: dalam studi hubungan internasional,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-28)
29. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, “ASEAN Selayang Pandang”, edisi Ke-21, 2015,. Hal. 39. [↑](#footnote-ref-29)